



# KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN KETAHANAN PANGAN

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN, PASAR MINGGU JAKARTA 12550  
TELEPON (021) 7805035-7805641, FAKSIMILI (021) 78846536  
WEBSITE : <http://bkp.deptan.go.id>

Nomor : B.932/KP.220/J.1/05/2017  
Lampiran :  
Perihal : Penyampaian DUPAK PMHP  
Periode Penilaian Juli 2017

4 Mei 2017

Yth.  
(Daftar Terlampir)

di  
Tempat

Dalam rangka persiapan penilaian angka kredit Pengawasan Mutu Hasil Pertanian (PMHP), Sekretariat Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian Sekretariat Badan Ketahanan Pangan akan melaksanakan penilaian angka kredit pada bulan Juli 2017 oleh Tim Penilai Jabatan Fungsional PMHP.

Sehubungan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tim Penilai akan melaksanakan penilaian angka kredit terhadap Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) dengan Masa Penilaian **1 Juni 2016 s.d 31 Mei 2017** (untuk penilaian 12 bulan) atau Masa Penilaian **1 Desember 2016 s.d. 31 Mei 2017** (untuk penilaian 6 bulan).
2. DUPAK yang diajukan harus disusun sesuai butir-butir kegiatan yang tercantum dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan dalam jabatan fungsional PMHP **dijilid** (ketebalan maksimal 10 cm, bila lebih dari 10 cm dapat dijadikan 2 jilid), dan disertai surat pengantar dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
3. DUPAK harus dilengkapi dengan bukti fisik dan surat pernyataan melakukan kegiatan/ telah mengikuti diklat yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serta melampirkan dokumen sebagai berikut:
  - a. Photo copy Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional PMHP.
  - b. Photo copy SK Jabatan Terakhir
  - c. Photo copy SK Pangkat Terakhir
  - d. Photo copy PAK/HAPAK terakhir
  - e. Photo copy Kartu Pegawai bagi yang belum tercantum di PAK/HPAK
4. Dari point no. 3 (a,b,c,d,e) secara terpisah dilampirkan dalam amplop coklat dan diselipkan ke dalam DUPAK yang bersangkutan.
5. Bagi Pejabat Fungsional PMHP Penyelia pangkat Penata Tk.I (Gol. III/d) setiap tahun diwajibkan mengajukan DUPAK dan memperoleh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) angka kredit yang berasal dari tugas pokok.



6. Bagi Pejabat fungsional PMHP Madya pangkat Pembina Utama Muda (Gol. IV/c) setiap tahun diwajibkan mengajukan DUPAK dan memperoleh sekurang-kurangnya 20 ( dua puluh) angka kredit yang berasal dari tugas pokok.
7. Pengajuan DUPAK Periode ini sudah diterima Sekretariat Badan Ketahanan Pangan paling lambat pada hari Jumat, 9 Juni 2017.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, diucapkan terima kasih.



Sekretaris Badan,

Ir. Mulyadi Hendiawan, MM  
NIP. 19600625 198503 1 003

Tembusan:  
Kepala Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan



Lampiran Surat No : B.932/KP.220/J.1/05/2017

Tanggal : 4 Mei 2017

---

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian.
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian.
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian.
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian.
5. Sekretaris Badan Karantina Pertanian.
6. Kepala Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, BKP Kementan.
7. Kepala Balai Besar Perbenihan & Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya, Ditjen. Perkebunan.
8. Kepala Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan, Ambon, Ditjen. Perkebunan.
9. Kepala Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementan
10. Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Bogor, Ditjen. PKH Kementan
11. Kepala Pusat Keamanan Hayati Nabati, Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian.
12. Kepala Balai Besar Karantina Pertanian Belawan, Badan Karantina Pertanian, Kementan
13. Kepala Balai Karantina Pertanian Soekarno Hatta Jakarta, Barantan, Kementan
14. Kepala Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian Jakarta Timur, Barantan, Kementan
15. Kepala Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok, Barantan, Kementan
16. Kepala Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian, Cikarang Barat, Bekasi, Barantan
17. Kepala Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya, Badan Karantina Pertanian, Kementan
18. Kepala Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Medan, Badan Karantina Pertanian, Kementan
19. Kepala Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Padang, Badan Karantina Pertanian, Kementan
20. Kepala Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Gorontalo, Badan Karantina Pertanian, Kementan
21. Kepala Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Ambon, Badan Karantina Pertanian, Kementan
22. Kepala Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Biak, Badan Karantina Pertanian, Kementan
23. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Aceh.
24. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara.
25. Kepala Balai Perlindungan Tanaman Pangan & Hortikultura, Dinas Pertanian Prov. Sumatera Utara.
26. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat.
27. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat.
28. Kepala Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat
29. Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat.
30. Kepala Dinas Pertanian Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat.
31. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat.
32. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Perkebunan Prov. Sumatera Barat.
33. Kepala Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat.
34. Kepala Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat.
35. Kepala Lembaga Sertifikasi Organik Provinsi Sumatera Barat.
36. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau.
37. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.
38. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi.
39. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi.
40. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu.
41. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu.
42. Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan.
43. Kepala Dinas Pertanian Kota Lubuklinggau Prov. Sumatera Selatan.
44. Kepala Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
45. Kepala Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
46. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
47. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bangka Barat
48. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur
49. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
50. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung



51. Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Bogor, Ditjen PKH Kementan
52. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat
53. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat
54. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat
55. Kepala Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Cikole Lembang Prov. Jawa Barat
56. Kepala Instalasi Laboratorium Kimia Agro Cikole, Lembang Prov. Jawa Barat.
57. Kepala Balai Pengujian & Penyidikan Penyakit Hewan, Dinas Pangan & Peternakan Prov. Jabar
58. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI
59. Kepala UPT Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan, Teknologi Peternakan dan Pengujian Mutu Hasil Peternakan Provinsi DKI
60. Kepala Pusat Pengujian Mutu dan Promosi Hasil Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan Provinsi DKI Jakarta
61. Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian Jakarta Pusat.
62. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat.
63. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten
64. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah
65. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah
66. Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang
67. Kepala Dinas Pertanian Pangan Perikanan Kabupaten Sleman Jawa Tengah
68. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang Jawa Tengah
69. Kepala Dinas dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung Jawa Tengah
70. Kepala Dinas Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Purworejo Jawa Tengah
71. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Purworejo
72. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung
73. Kepala Balai Veteriner, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Boyolali
74. Kepala Dinas Pertanian Provinsi DI. Yogyakarta
75. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi DI. Yogyakarta
76. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur
77. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Pemkab Blitar Jawa Timur
78. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur
79. Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
80. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Probolinggo Jawa Timur
81. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo
82. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar
83. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk
84. Kepala Balai Pengawasan dan Sertifikasi Hasil Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur
85. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bali
86. Kepala Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Bali
87. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali
88. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan Provinsi Bali
89. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat
90. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat
91. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat
92. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Timur
93. Kepala Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur
94. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Sumba Timur Prov. Nusa Tenggara Timur
95. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Nunukan Prov. Kalimantan Utara
96. Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat
97. Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak Prov. Kalimantan Barat
98. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kubu Raya Prov. Kalimantan Barat
99. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat
100. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah
101. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah
102. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah



103. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan
104. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur
105. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur
106. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara
107. Kepala Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Utara.
108. Kepala Dinas Pertanian Daerah Provinsi Sulawesi Barat
109. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Tengah
110. Kepala Tanaman Pangan dan Hortikultura Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
111. Kepala Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
112. Kepala Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara
113. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara
114. Kepala Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai Sulawesi Tenggara
115. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan
116. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan
117. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan
118. Kepala Balai Proteksi Tanaman Pangan & Hortikultura, Dinas Pertanian Prov. Sulawesi Selatan
119. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan dan Perkebunan Kota Palopo Sulawesi Selatan
120. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan
121. Kepala Balai Proteksi Tan. Pangan & Hortikultura Dinas Pertanian Prov. Sulawesi Selatan
122. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo
123. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku
124. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara
125. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Papua
126. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Papua Barat



Sekrstaris Badan,

Ir. Mulyadi Hendiawan, MM.  
NIP. 19600625 198503 1 003

